



# Wali Kota Tantang LSM Tangani Anjal

## Ajak Terjun Langsung Menangani, Tak Hanya Berteori

YOGYAKARTA (SI) – Wali Kota Yogyakarta Herry menantang lembaga swadaya masyarakat (LSM) tanpa terkecuali untuk terjun langsung secara praktis menangani permasalahan anak khususnya tentang anak jalanan (anjal).

Pernyataan wali kota ini menanggapi tuduhan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang menyebut Kota Yogyakarta tidak layak anak. Menurutnya, penghargaan yang diterima Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak 2009 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan bukan merupakan bagian dari ambisi.

Anugerah itu hanya sebagai

bukti bahwa penanganan anak di Kota Gudeg ini lebih baik dibanding kota lain. Kalaupun fakta di lapangan masih banyak kekurangan, Herry melihatnya sebagai hal yang lumrah. "Kami lebih baik dari kota lain, tapi belum sempurna. Kalau LSM merasa mampu, saya beri kesempatan untuk mengaplikasikan di lapangan," ujarnya kemarin.

Selain itu, masalah anjal merupakan persoalan klasik di tiap kota dan kabupaten. Herry mengaku belum memiliki formula dan sistem yang tepat untuk pengentasan anjal. Padahal berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan. Salah satunya dengan memasang pengumuman kepada masyarakat di perempatan jalan untuk tidak memberikan uang rezehan kepada mereka.

"Silakan LSM mempresentasikan program-programnya ke kami," ungkapnya, LSM yang lolos dalam seleksi akan diberi kewenangan menangani berbagai persoalan anak, tidak terkecuali

anak-anak jalanan. Pemkot nantinya juga menyediakan anggaran khusus untuk program ini. Ide seperti ini sebenarnya sudah pernah digulirkan 2007 lalu, tapi tidak ada tanggapan.

"Langsung aplikasi di lapangan. Kami tidak menginginkan penelitian atau hanya teori. Karena teori itu sudah ada dari dulu," tandasnya.

Diketahui, bertepatan dengan Hari Anak Nasional (HAN), Pemkot Yogyakarta menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut kemarin ditunjukkan wartawan di ruang utama bawah, Balai Kota Yogya-

karta. Selain menunjukkan trofi sebagai Kota Layak Anak, dalam kesempatan kemarin wali kota juga memperlihatkan trofi lain. Trofi kedua ini merupakan penghargaan atas kepedulian pemkot terhadap persoalan gender.

Sebelumnya, PKBI menuding penanganan anak jalanan yang dilakukan pemkot masih mengedepankan prinsip represif dan diskriminatif. Anak jalanan masih dianggap sebagai pengganggu ketertiban dan harus digaruk. Penanganan tidak dilakukan secara persuasif melalui pendekatan secara personal dan kepada orangtua.

Menurut PKBI, pemkot semestinya membuat regulasi yang di dalamnya mengatur tentang hak-hak anak dan perlindungan terhadap mereka.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial MK Pontjosiwi mengutarakan, anak jalanan yang berkeliaran di Kota Yogyakarta, 70% berasal dari luar DIY. Dari hasil operasi Dinas Ketertiban (Dintib) selama enam bulan terakhir, ada 1.363 anjal yang terjaring. Dari jumlah itu, 312 orang merupakan penduduk kota, 967 dari luar DIY, dan sisanya tidak jelas.

(arif budianto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat			

Yogyakarta, 21 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005